



**REPRESENTASI AKTOR SOSIAL KASUS PERUNDUNGAN ANAK PADA
KOMPAS.COM: ANALISIS WACANA KRITIS**

**REPRESENTATION OF SOCIAL ACTORS IN CHILD BULLYING CASE AT
KOMPAS.COM: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS**

Nurul Aulia Annisa, B.R. Suryo Baskoro

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Ponsel: 082340087187; Posel: nurulauliaannisa@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima tanggal: 21 Oktober 2022; Direvisi akhir tanggal: 2 April 2023; Disetujui tanggal: 25 Mei 2023
DOI: <https://doi.org/10.26499/mab.v17i1.600>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana *Kompas.com* sebagai salah satu media elite dengan *traffic* pembaca tertinggi di Indonesia dalam merepresentasikan kasus perundungan terhadap anak SD di Tasikmalaya yang terjadi pada Juli 2022. Pengungkapan dijabarkan secara deskriptif dengan berlandaskan pada pendekatan Analisis Wacana Kritis. Model analisis wacana kritis yang digunakan adalah model Norman Fairclough, khususnya untuk mengkaji pilihan-pilihan tekstual *Kompas.com*, seperti pilihan kata dan kalimat. Terdapat 36 teks berita yang dirilis *Kompas.com* yang berkaitan dengan kasus perundungan ini. Karena luasnya populasi data, data dibatasi dengan teknik *purposive sampling* sehingga hanya 15 teks berita yang dipilih. Data kemudian dikumpulkan melalui metode simak dengan teknik catat. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa *Kompas.com* dalam merepresentasikan aktor sosial yang terlibat cenderung tidak setara, yakni korban dijelaskan melalui kronologi kejadian dengan leksikon bernada emosional. Pelaku, di sisi lain, digambarkan melalui penggambarannya sebagai pihak yang tidak berniat merundung korban dan pihak yang membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwenang. Adapun pihak yang berwenang, penggambarannya didominasi oleh leksikon-leksikon deskriptif karena berfokus pada penjelasan mengenai tugas pokok hingga tanggapan yang diberikan. Di sisi lain, peristiwa perundungan digambarkan *Kompas.com* sebagai peristiwa yang kompleks, yakni banyaknya faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya perundungan. Penekanan pada faktor-faktor sosial ini secara tidak langsung menjauhkan pelaku dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang juga bersalah dalam peristiwa yang terjadi.

Kata kunci: keberpihakan media; kasus perundungan; pelaku; korban; Kompas.com

Abstract

This study aims to explore how *Kompas.com* as one of the elite media in Indonesia represents the bullying case happened to an elementary school child in Tasikmalaya, July, 2022. Disclosures are drawn descriptively based on the Critical Discourse Analysis approach. The critical discourse analysis model used is Norman Fairclough's model, especially to examine *Kompas.com*'s textual choices, such as word and sentence. There are 36 news texts released by *Kompas.com* related to this bullying case. Due to the large data population, the data is limited by purposive sampling, so that only 15 news texts are selected. Data were collected by observing method with note-taking technique. The data analysis reveals that *Kompas.com* tends to present social actors unequally. The victim is primarily described through chronological account of events using emotionally-tone lexicon. On the other hand, perpetrators are portrayed as the party who did not intend to bully the victim and need protection from the authorities. Last, the authorities are explained predominantly through descriptive lexicons which focus on explaining their main tasks and responses to the case. Moreover, the bullying incident was described by *Kompas.com* as a complex event that was caused by many social factors. The emphasis on social factors indirectly distanced the perpetrators from their responsibilities as the parties who were also guilty of the incident.

Keywords: *media bias; bullying case; victim; perpetrators; Kompas.com*

1. Pendahuluan

Media massa menjadi salah satu sumber utama bagi publik dalam mendapatkan berita dan informasi tentang berbagai hal. Karenanya, wacana media sering disebut sebagai bentuk representasi dari realitas yang ada di lapangan. Namun demikian, realitas yang diproduksi media tentu telah melewati proses transformasi yang panjang, sehingga peristiwa yang ditampilkan tidak seutuhnya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Kress (dalam Fowler, 1991) bahwa wacana media merupakan tahap akhir dari seperangkat kerja yang disusun secara sistematis dengan berpatokan pada nilai-nilai yang dianut oleh instansi media. Oleh karena itu, media memiliki kuasa untuk menentukan bagian mana dalam pemberitaan yang ingin dimasukkan (*included*) dan bagian mana yang ingin dikeluarkan (*excluded*). Lebih lanjut, Fairclough mengatakan bahwa berita jarang adil dengan semua suara yang diwakili. Selalu ada yang diunggulkan dan dipinggirkan. Beberapa digunakan untuk membingkai orang lain. Beberapa dilegitimasi dengan diangkat dalam suara (pendapat) pembaca berita atau reporter, dan yang lain tidak (Fairclough, 1995). Dengan demikian, teks berita yang dirilis oleh media tidak sepenuhnya menunjukkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, tetapi fakta itu sudah direkonstruksi dan ditransformasikan ulang (Fowler, 1991).

Media berita di sisi lain memiliki hak istimewa untuk mengontrol dan menyebarluaskan secara spesifik bentuk-bentuk wacana yang di dalamnya tergambar ideologi dan keberpihakan media tersebut (Wyszomierski, 2015). Karena pada faktanya, media secara aktif memberikan informasi kepada publik, dan publik pembaca menjadi pihak yang pasif dalam menerima. Hal tersebut mengisyaratkan adanya kuasa sepihak dari media itu sendiri. Adanya kuasa sepihak ini tentu memiliki dampak terhadap bagaimana publik menginterpretasikan suatu hal, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dan kemampuan untuk menganalisis secara kritis wacana yang beredar di tengah masyarakat.

Keberpihakan media terhadap kelompok, individu, maupun isu tertentu tidak tergambar secara langsung pada tubuh teks berita. Hal ini dikarenakan media dalam mengkonstruksi teks beritanya selalu menggunakan pilihan-pilihan tekstual tertentu yang dapat memberi kesan baik ataupun buruk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan. Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah salah satu pendekatan yang dapat menjadi alternatif untuk melihat keberpihakan media terhadap aktor sosial tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap pilihan-pilihan tekstual seperti misalnya pilihan kata

dan jenis kalimat, nantinya akan terlihat ideologi dan keberpihakan dari media tersebut. Apakah media lebih condong terhadap pihak yang dominan atau pihak yang termarginalkan. Karena seperti yang dikatakan van Leeuwen (2018) bahwa teks yang dalam ini termasuk teks berita memainkan peran kunci dalam mempertahankan dan melegitimasi ketidaksetaraan, ketidakadilan dan penindasan di masyarakat. Dengan demikian, pembacaan kritis sangat diperlukan.

Perundungan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sampai hari ini masih sulit untuk diberantas (Garnefski & Kraaij, 2014). Di Indonesia sendiri, pembahasan seputar perundungan masih terus disuarakan oleh banyak pihak, seperti misalnya dari sisi psikologis yang melihat dampak serta penyebab utama kasus-kasus perundungan masih terus terjadi. Sementara itu, penelitian PISA (*Programme for International Student Assessment*) di tahun 2018 menemukan bahwa sejumlah 41% pelajar di Indonesia yang berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan (UNICEF Indonesia, 2020). Adapun informasi yang diterima masyarakat terkait kasus-kasus perundungan tentunya dimediasi oleh bahasa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat permasalahan ini dari kacamata Analisis Wacana Kritis, agar informasi yang disampaikan ke publik tidak diterima apa adanya.

Penelitian seputar kasus perundungan dalam perspektif Analisis Wacana Kritis sejauh ini masih belum menjadi topik populer penelitian, layaknya topik lain seperti representasi kelompok minoritas (Nartey & Ladegaard, 2021; Onay-Coker, 2019; Osisanwo & Iyoha, 2020; Samaie & Malmir, 2017; Sengul, 2022; Wang & Ma, 2021), hingga representasi perempuan dan laki-laki dalam hal diskriminasi gender (Peng, A. Y., & Talmacs, N., 2022; Peng & Talmacs, 2022; Žuk & Žuk, 2020). Se jauh pengamatan, ditemukan tiga penelitian yang mencoba melihat representasi kasus perundungan dari kacamata AWK, yakni penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, T. V., Anshori, D. S., & Nurhadi, J., 2021; Noor & Abdul Hamid, 2021; Yanti, F. D., Fata, A. K., & Anwari, A., 2021).

Ketiga penelitian di atas secara keseluruhan memiliki kesamaan dalam hal topik dengan penelitian ini, yakni melihat perundungan dari perspektif Analisis Wacana Kritis. Yanti dkk melalui penelitiannya, mencoba menekankan pada perbedaan ideologi dalam pemberitaan Kompas.com dan Republika terkait kasus perundungan terhadap Audrey, yakni dengan menggunakan pendekatan AWK versi van Dijk (Yanti, F. D., Fata, A. K.,

& Anwari, A., 2021). Berbeda halnya dengan Amalia (2021) yang berfokus pada penelitian terkait teknik penggambaran aktor sosial oleh 5 koran digital Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan model analisis van Leeuwen terkait representasi aktor sosial. Dalam kesimpulannya, penulis hanya berhenti pada penyebutan jenis teknik penggambaran yang digunakan tanpa penjelasan lebih jauh tentang efek yang diakibatkan oleh teknik penggambaran tersebut dalam sebuah pemberitaan. Terakhir, (Noor & Abdul Hamid, 2021) mencoba meneliti komentar Instagram “Emma Maembong”, seorang artis Malaysia yang memutuskan untuk melepas hijabnya. Penelitian ini menemukan adanya polarisasi “*us vs them*” antara netizen yang memberi komentar dan Emma Maembong yang dikomentari. Dalam hal ini, penggunaan hijab mendefinisikan siapa yang termasuk dalam kelompok dan siapa yang tidak, dan untuk alasan ini, wanita Muslim yang memilih untuk tidak berhijab diperlakukan dengan kebencian dan permusuhan karena tindakan mereka dianggap sebagai ancaman dan pengkhianatan terhadap keyakinan bersama kelompok tersebut (netizen). Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan adanya sanksi hukum terhadap kejahatan siber karena dampaknya pada korban yang sangat merugikan. Adapun penelitian ini berbeda dalam hal model analisis wacana kritis yang digunakan, yakni menggunakan model Fairclough, utamanya pada dimensi pertama (dimensi tekstual) khususnya berfokus pada representasi peristiwa dan aktor sosial. Di sisi lain, penelitian ini juga membahas secara khusus kasus perundungan terhadap anak di bawah umur, yang akhir-akhir ini mengalami jumlah peningkatan kasus (UNICEF Indonesia, 2020). Sehingga perlu adanya penelitian dalam perspektif analisis wacana kritis, khususnya untuk mengkaji representasi aktor sosial, untuk melihat sikap media dalam menggambarkan para aktor sosial yang terlibat.

Media daring Kompas.com dipilih sebagai sumber data penelitian karena menjadi salah satu media *elite* dengan *traffic* pembaca tertinggi yang *concern* dalam memberitakan kasus perundungan. Salah satu kasus perundungan yang menyita perhatian banyak pihak adalah kasus perundungan terhadap anak SD di Tasikmalaya yang terjadi Juli 2022 lalu. Kasus ini, oleh banyak pihak, dianggap sebagai simbol lemahnya perlindungan terhadap anak korban perundungan di Indonesia, terlebih peristiwa ini terjadi berdekatan dengan diperingatinya hari anak nasional. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus akan mencoba menyoroti kasus perundungan ini. Terhitung kurang lebih 36 teks berita dirilis Kompas.com terkait kasus perundungan tersebut. Adapun analisis wacana kritis model

Fairclough digunakan sebagai pendekatan utama dalam menganalisis pilihan-pilihan tekstual Kompas.com dalam merepresentasikan aktor sosial yang terlibat.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Kompas.com merepresentasikan masing-masing aktor sosial dan peristiwa perundungan yang terjadi, apakah pelaku digambarkan sebagai pelaku dan korban digambarkan sebagai korban, dan apakah kasus perundungan digambarkan sebagai sebuah kejahatan atau sebaliknya. Pengungkapan bagaimana aktor sosial yang terlibat dalam pemberitaan direpresentasikan oleh Kompas.com tidak hanya menguraikan bagaimana keberpihakan media terhadap aktor-aktor tersebut, tetapi juga menyadarkan publik bahwa analisis kritis sangat dibutuhkan dalam pembacaan sebuah informasi.

2. Landasan Teori

Analisis Wacana Kritis merupakan sebuah pendekatan interdisipliner untuk studi tekstual yang bertujuan untuk menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan yang dipromosikan oleh teks-teks tersebut, dengan menganalisis detail linguistik dalam konteks sosial dan politik yang lebih besar (Huckin, T., Andrus, J., & Clary-Lemon, J., 2012). Secara umum, dapat dikatakan bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah pendekatan yang mencoba mengidentifikasi cara bahasa digunakan untuk membangun representasi tertentu dari dunia dalam kaitannya dengan ideologi, sikap atau hubungan kekuasaan (Afzaal, M., Hu, K., Ilyas Chishti, M., & Khan, Z., 2019). Pendekatan analisis wacana kritis dilandasi oleh tujuan untuk mengkritik dan mentransformasi hubungan sosial yang timpang. Oleh karena itu, para peneliti AWK senantiasa menempatkan dirinya bukan hanya sebagai peneliti tetapi juga sebagai aktivis yang mengedepankan pemihakannya pada masyarakat bawah (Eriyanto, 2015).

Dalam pandangan Fairclough, wacana bukan hanya sebatas rangkaian kalimat yang membentuknya. Lebih jauh, wacana merupakan praktik sosial. (Fairclough, 1995). Artinya, setiap wacana memiliki pesan tersirat, ideologi, serta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Untuk menyingkap struktur-struktur kekuasaan dan ideologi ini, Fairclough mencetuskan pendekatan Analisis Wacana Kritis versinya. Analisis Wacana Kritis Fairclough menerapkan kerangka analisis tiga dimensi dalam mengkritisi sebuah wacana. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi teks, praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) (Fairclough, 1995). Akan tetapi dalam

penelitian ini, analisis dikhususkan hanya pada dimensi pertama, yakni dimensi tekstual. Karena seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa tujuan utama penelitian ini adalah membahas representasi aktor dan peristiwa sosial, dan hal tersebut berada pada dimensi tekstual.

Dalam pengertian Fairclough, analisis teks merupakan bagian yang paling mendasar dalam menganalisis sebuah wacana (Fairclough, 2006). Analisis tekstual salah satunya berbicara tentang representasi. Representasi dalam teks adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, ditampilkan atau digambarkan dalam teks. Representasi ini penting dalam dua hal; pertama, apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Kata ‘semestinya’ ini mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu diberitakan apa adanya, ataukah diburukkan, ataukah yang baik menjadi buruk. Penggambaran yang ditampilkan bisa jadi adalah penggambaran yang buruk dan cenderung memarjinalkan seseorang atau kelompok tertentu, ataupun sebaliknya yang buruk digambarkan dengan citra yang baik. Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan dengan pilihan kata, jenis kalimat, kohesi dan lain-lain (Eriyanto, 2015).

Kita dapat melihat teks dari sudut pandang representasional dalam hal elemen peristiwa mana yang termasuk dalam representasi peristiwa tersebut dan mana yang dikecualikan, dan elemen mana yang termasuk diberi keunggulan atau elemen mana yang dikaburkan (Fairclough, 2004). Karena peristiwa sosial dapat direpresentasikan pada berbagai tingkat abstraksi dan generalisasi. Dalam teori representasinya, Fairclough menyebutkan bahwa penggambaran peristiwa dan aktor sosial akan terlihat melalui pilihan leksikon, kalimat, hingga penggunaan ekspresi kebahasaan tertentu seperti misalnya metafora ataupun eufemisme.

2.1 Pilihan Leksikon

Dalam pandangan Fairclough, seorang jurnalis dalam menulis beritanya akan dihadapkan pada pilihan. Pertama adalah pada tingkat kosakata, kosakata apa yang digunakan untuk menampilkan dan menggambarkan baik peristiwa sosial maupun pihak yang terlibat dalam pemberitaan. Misalnya orang miskin dapat dibahasakan dengan kata miskin, tidak punya, tidak mampu, kurang beruntung, kelompok terpinggirkan, dan bahkan dapat disebut sebagai kelompok yang tertindas. Semua kosakata ini masing-masing

menghasilkan makna yang berbeda dalam penggunaannya. Namun yang menarik adalah bukan hanya bagaimana pilihan kata yang dipilih menimbulkan realitas yang berbeda, tetapi juga bagaimana realitas yang sama dapat dibahasakan secara berbeda (Eriyanto, 2015)

2.2 Jenis Kalimat

Selain pilihan kata, penggunaan jenis kalimat tertentu juga akan menghasilkan representasi yang berbeda dalam sebuah pemberitaan. Dalam kalimat aktif misalnya, aktor pelaku hadir dalam kalimat. Berbeda halnya dalam kalimat pasif, aktor pelaku dihilangkan dalam pemberitaan, sebab yang lebih dipentingkan adalah objek. Misalnya dalam pemberitaan mengenai kejadian penembakan dalam peristiwa demonstrasi, antara kalimat “polisi menembak mahasiswa” dan “seorang mahasiswa ditembak oleh polisi” tentu menunjukkan fokus pemberitaan yang berbeda. Pada contoh pertama, fokus pemberitaan adalah polisi yang menjadi pelaku utama penembakan. Berbeda halnya dengan kalimat kedua yang berfokus pada peristiwa kejadian, sehingga pelaku tidak menjadi penting dalam hal ini. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa penggunaan jenis kalimat tertentu tidak hanya berhubungan dengan persoalan teknis kebahasaan, akan tetapi juga menentukan makna yang dihasilkan oleh susunan kalimat tersebut. (Eriyanto, 2015).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan yang terakhir adalah tahap penulisan hasil analisis data. Data dalam penelitian ini adalah data tulis, yakni wacana tulis terkait berita perundungan pada media daring Kompas.com, terkhusus pada berita terkait perundungan anak SD di Tasikmalaya yang terjadi pada bulan Juli 2022. Adapun jumlah teks berita yang dirilis Kompas.com terkait peristiwa ini adalah 36 teks berita. Berdasarkan 36 teks berita ini, kemudian dipilih 15 teks berita melalui metode *purposive sampling*, dikarenakan tidak semua teks berita mengandung representasi masing-masing aktor sosial. Oleh karena itu, penggunaan metode *purposive sampling* adalah untuk memilih berita yang di dalamnya mengandung unsur representasi, baik terhadap aktor sosial yang terlibat maupun terhadap peristiwa perundungan yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah media daring Kompas.com. Data kemudian diperoleh melalui metode simak dengan teknik catat (Mahsun, 2017), yakni menyimak secara mendalam penggunaan bahasa (pilihan kata,

kalimat) dalam wacana kasus perundungan yang ditulis oleh Kompas.com, yang selanjutnya akan dicatat pada kartu wacana.

Data dalam penelitian ini kemudian dianalisis melalui pilihan tekstual yang digunakan Kompas.com seperti misalnya pilihan kata dan kalimat dengan mengacu pada teori utama Fairclough mengenai representasi peristiwa dan aktor sosial. Data yang telah dianalisis selanjutnya diinterpretasikan dan dijelaskan bentuk dan makna yang muncul berdasarkan teks yang dianalisis, sehingga pada akhirnya terungkap bagaimana pihak-pihak tersebut direpresentasikan. Pada tahap akhir, kesimpulan dari hasil analisis data akan disajikan secara deskriptif.

4. Pembahasan

Representasi seperti yang dibahas sebelumnya mengacu pada bagaimana Kompas.com menggambarkan peristiwa perundungan dan aktor sosial (pelaku, korban, pihak yang berwenang) yang terlibat dalam pemberitaan kasus perundungan anak SD di Tasikmalaya. Analisis dilakukan dengan mencermati setiap teks berita yang dirilis Kompas, fokus utamanya adalah pilihan tekstual yang meliputi pilihan kata maupun bentuk kalimat yang digunakan. Berikut adalah pilihan-pilihan tekstual yang digunakan Kompas dalam teks berita yang ditulisnya.

4.1 Representasi Aktor Sosial

4.1.1 Pilihan Leksikon

Dalam menulis sebuah berita, seorang wartawan akan menggunakan beberapa pilihan leksikon di antara leksikon yang ada. Lebih jauh, (Dijk, 1988; He & Zhou, 2015) mengatakan bahwa ideologi dan opini tersembunyi di balik penggunaan leksikon tertentu. Dengan kata lain, analisis terhadap pilihan leksikon akan menggambarkan ideologi media tersebut serta bagaimana peristiwa dan aktor sosial yang terlibat digambarkan.

4.1.1.1 Pihak yang Berwenang

Hasil analisis dari teks berita kasus perundungan anak SD di Tasikmalaya yang dirilis Kompas.com, ditemukan tiga aktor sosial yang terlibat dalam pemberitaan, yakni pihak yang berwenang, pelaku, dan korban. Adapun pihak berwenang terdiri dari beberapa pihak penting seperti Polisi, KPAI, Psikolog, Presiden, Gubernur, Anggota DPR, Presiden dll.

Dalam kaitannya dengan “pihak yang berwenang”, Kompas.com secara eksplisit lebih banyak membahas andil yang dimiliki oleh para pihak tersebut. Artinya yang ditonjolkan adalah mereka sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menangani kasus perundungan. Hal ini terlihat dari kosakata (kata kerja) yang digunakan; *meminta, mendesak, menginvestigasi, memastikan, mengecam, menegaskan, mendorong, mengomentari, menangani, memproses, melaporkan, menilai, memeriksa, menuntaskan, mengamankan, mengungkapkan, memutuskan*. Pilihan kata ini digunakan berulang kali oleh Kompas.com yang sekaligus juga sebagai penanda adanya penekanan bahwa pihak yang berwenang adalah pihak yang memiliki kuasa dan peran penting dalam penanganan kasus perundungan tersebut.

Secara istilah, tidak ada yang salah dengan penggunaan kata-kata tersebut karena pada dasarnya pihak-pihak berwenang memang identik dengan penggambaran kekuasaannya. Namun, Kompas.com juga memiliki kuasa untuk menggunakan pilihan leksikon yang lain dalam menjelaskan peran dari pihak-pihak tersebut, seperti mempertanyakan realisasi tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri pihak-pihak tersebut. Namun demikian, Kompas.com lebih berfokus pada pembahasan seputar tanggapan dan pendapat mereka terhadap kasus yang terjadi. Seperti pada beberapa penggalan teks berita berikut;

- (1) Ketua Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Roberth Rouw **mendesak** pihak kepolisian segera **menuntaskan** perkara perundungan anak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia prihatin pada peristiwa itu karena perundungan disertai dengan kekerasan dan tindak asusila yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun Roberth juga **meminta** agar proses pengungkapan perkara sesuai UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ia **berpandangan** orangtua memiliki peran sentral untuk memutus perilaku perundungan yang dilakukan anak.
- (2) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil **mengecam** keras tindakan perundungan yang dilakukan pelajar sekolah dasar di Tasikmalaya yang mengakibatkan korban depresi dan meninggal dunai. Emil juga **meminta** para orangtua bisa menanamkan nilai karakter dan tata krama agar kejadian serupa tak terulang.
- (3) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily **meminta** KPAID mendampingi terduga pelaku perundungan [...] Politisi Golkar ini **menilai** kejadian ini merupakan sebuah ironi. Ia berharap masalah ini menjadi evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan. Di sisi lain, Ace juga **mendesak** KPAID Kabupaten Tasikmalaya memeriksa lingkungan sosial tempat peristiwa perundungan terjadi.
- (4) Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto telah melaporkan kasus ini ke Polres Tasikmalaya. Ia **menegaskan** jalur hukum ditempuh untuk menjadi pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi pelaku

- (5) Jokowi **menegaskan**, semua kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual harus diproses secara hukum dengan **tegas** supaya kasus tersebut tidak akan terjadi lagi

Beberapa penggalan teks berita di atas berfokus pada penggambaran pihak berwenang sebagai pihak yang memiliki kuasa. Padahal jika dicermati, terdapat banyak hal yang perlu dipertanyakan dari pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Misalnya pernyataan Presiden Jokowi “*Jokowi menegaskan, semua kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual harus diproses secara hukum dengan tegas supaya kasus tersebut tidak akan terjadi lagi*”. Dalam hal ini Kompas.com dapat mempertanyakan proses hukum seperti apa yang dimaksud. Terlebih dalam kasus tersebut pelakunya merupakan anak di bawah umur sehingga Undang-Undang yang diberlakukan juga berbeda. Kompas.com dapat memastikan sudahkah UU yang diberlakukan memberi efek jera kepada pelaku. Sebab, selama ini seringkali kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang masih anak-anak mencari perlindungan di balik Undang-Undang yang berlaku, usia yang masih anak-anak seringkali dijadikan dalih untuk mendapatkan perlakuan khusus, misalnya dengan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Pada akhirnya, kasus tersebut tidak pernah benar-benar membuat pelaku jera dan pelaku terbebas dari hukumannya (Erdatimulia, N., Lestari, R. S., & Fajarwati, N. K., 2022). Namun dalam hal ini Kompas.com lebih banyak menekankan pihak-pihak berwenang melalui tanggapan mereka akan kasus kejadian, seperti misalnya menentang ataupun mengecam kasus perundungan tersebut.

4.1.1.2 Pelaku Vs Korban

Pelaku dan korban dalam kasus perundungan anak SD di Tasikmalaya diberitakan dengan strategi yang berbeda oleh Kompas.com. Dalam pemberitaan, korban secara dominan digambarkan melalui serangkaian kronologi kejadian, bahwa korban telah mengalami perundungan yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengalami depresi yang kemudian mengakibatkannya meninggal dunia. Pernyataan ini hampir selalu muncul dalam berita yang dirilis Kompas.com. Penggambaran ini biasanya digunakan Kompas.com sebagai pembuka dan penutup isi berita, seperti misalnya dalam kutipan berita berikut.

- (6) Seorang bocah kelas V SD berinisial F (11) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, **dipaksa** teman-temannya bersetubuh dengan kucing

sembari direkam menggunakan ponsel, pekan lalu. Akibat rekaman tersebar, korban menjadi **depresi** dan tidak mau makan dan minum sampai kemudian F meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit pada Minggu (18/7/2022). Selain menjadi korban perundungan selama masih hidup, bocah itu diketahui kerap **dipukuli** oleh teman-teman bermainnya. Korban merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

- (7) Sebelumnya diberitakan, seorang bocah SD berumur 11 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, **dipaksa** teman-temannya menyetubuhi kucing sembari direkam pakai ponsel. Akibat rekaman itu tersebar, korban menjadi **depresi** dan tidak mau makan dan minum sampai kemudian **meninggal dunia** saat dirawat di rumah sakit pada Minggu (17/7/2022). Selain menjadi korban perundungan selama masih hidup, F diketahui **kerap dipukuli** teman-teman bermainnya selama ini. Kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi.
- (8) Sebagai informasi, peristiwa perundungan yang **diduga** menjadi penyebab F meninggal dunia terjadi pada awal Juli 2022. Korban disebut **ditarget** menjadi tempat perundungan oleh empat orang terduga pelaku. Puncak perundungan, korban **dipaksa** bersetubuh dengan kucing dan **direkam** oleh salah satu terduga pelaku sambil melontarkan cemoohan.

Dalam contoh kutipan teks di atas, terlihat bagaimana korban digambarkan melalui kronologi kejadian dengan penekanan sebagai pihak yang lemah karena tidak bisa melakukan perlawanan. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Kompas.com menggambarkan kejadian dengan kata “**dipaksa**” yang selalu muncul dalam penjelasan kronologi kejadian, semakin menegaskan bahwa korban berada pada pihak yang tidak memiliki *power* lebih untuk melawan.

Kompas.com disisi lain menyimpulkan bahwa perilaku perundungan yang menimpa korban bukanlah kejadian yang pertama kali, melainkan korban “**kerap dipukuli**” oleh pelaku. Keterangan yang didapatkan Kompas.com terkait seringnya korban dipukuli seharusnya menjadi acuan utama terkait bagaimana kasus ini bukanlah sesuatu yang kebetulan terjadi, melainkan korban adalah pihak yang telah lama menjadi target perundungan. Dalam hal ini, Kompas.com tidak mencoba menggambarkan lebih jauh bagaimana perlakuan yang diterima korban memberikan trauma yang mendalam tidak hanya bagi korban namun juga bagi keluarganya. Penderitaan yang dialami korban hanya digambarkan melalui kronologi kejadian, bahwa korban dirundung dengan dipaksa menyetubuhi kucing yang mengakitkannya depresi. Depresi yang dialami korban juga seharusnya bisa menjadi fokus utama Kompas.com bahwa kasus perundungan tersebut bukanlah kejadian sepele. Terlebih, perundungan tersebut bukanlah yang pertama kali diterima korban melainkan kerap dilakukan (dipukuli).

Kompas.com pada sisi lain lebih berfokus untuk membahas kondisi psikis pelaku yang mengalami stres dan syok akibat perbuatannya. Lebih jauh, pelaku juga dijelaskan sebagai pihak yang tidak berniat melakukan perundungan. Selain itu, pelaku juga digambarkan sebagai pihak yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Secara keseluruhan, representasi yang terlihat lebih menjelaskan pelaku sebagai pihak yang tidak sepenuhnya harus disalahkan, karena bagaimanapun mereka tidak pernah berniat melakukannya. Kompas.com lebih berfokus menggambarkan pelaku sebagai pihak yang tidak berniat melakukan perundungan dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini terlihat dari dua penggalan teks berikut.

- (9) Para pelaku sebelumnya sempat **stres** dan **syok** saat beritanya viral kemudian diterapi psikis sampai akhirnya membaik [...] Ketiga pelaku mengaku **tidak berniat** merundung korban. Mereka pun **menyesali** perbuatannya kepada korban [...] Sampai sekarang, ketiga pelaku pun masih **didampingi** seorang psikolog untuk memberikan **terapi** berkesinambungan di rumah aman [...] Ketiga pelaku mengaku tidak berniat merundung korban. Meski demikian mereka mengaku **menyesal** atas perbuatan yang dilakukannya saat korban masih hidup. Mereka pun **berjanji** tak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada orang lain.
- (10) Menurut para pelaku sempat **stres** dan **syok** saat beritanya viral, namun setelah **diterapi** psikis sampai akhirnya membaik.

Korban dan pelaku dalam hal ini masing-masing memiliki argumen terkait peristiwa perundungan yang terjadi. Di satu sisi, korban mengaku (konfirmasi keluarga) kerap dipukuli oleh pelaku. Namun di sisi lain, pelaku mengaku bahwa mereka tidak berniat merundung korban dan bahkan telah menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kedua pernyataan tersebut tentunya saling berlawanan. Namun pada prakteknya, Kompas.com tidak melihat kedua pernyataan ini sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan dan hanya sebatas untuk diinformasikan.

Kompas dalam hal ini bisa lebih jauh lagi membahas bagaimana dampak tersebut tidak hanya membuat korban menderita namun juga memberi trauma yang mendalam kepada pihak terdekatnya seperti misalnya keluarga, terlebih korban bahkan harus kehilangan nyawanya. Pembahasan terkait representasi aktor sosial di atas mengungkapkan bahwa representasi Kompas.com terhadap pihak yang terlibat tidaklah netral karena cenderung berfokus pada pihak tertentu saja, hal ini senada dengan

pernyataan Caldas-Coulthard bahwa media jarang bersikap netral dan bahkan hampir tidak pernah (Caldas-Coulthard, 2003).

4.1.2 Jenis Kalimat

Penggambaran aktor sosial dalam teks berita tidak hanya terlihat dari pilihan kata yang digunakan. Bentuk kalimat juga menjadi penting karena menentukan bagaimana pihak-pihak yang terlibat digambarkan. Secara umum, kalimat deklaratif menjadi kalimat yang paling sering digunakan dalam penulisan teks berita yang dirilis Kompas.com. Secara fungsi, kalimat deklaratif biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan hal ini menjadi wajar, mengingat tujuan utama sebuah teks berita adalah menyampaikan informasi kepada pembaca terkait suatu kejadian (Wiredu, 2012). Di sisi lain, dominasi penggunaan kalimat deklaratif juga menunjukkan sikap Kompas.com terhadap peristiwa perundungan. Artinya, peristiwa perundungan direpresentasikan sebagai sesuatu yang hanya perlu untuk sekadar diinformasikan, bukan sebagai sesuatu yang juga perlu dipertanyakan atau disikapi. Kalimat deklaratif umumnya juga menghadirkan makna sikap netral dari pihak media itu sendiri, dengan menghadirkan fakta dan data secara apa adanya. Akan tetapi, media dalam hal ini yang menjadi pemegang kuasa utama juga dapat mengonstruksi teks beritanya dengan menggunakan kalimat interogatif yang tidak hanya berfungsi menanyakan suatu hal, namun juga merupakan perwujudan dari sikap media itu sendiri dalam mengintervensi peristiwa yang diliputnya. Selain kalimat deklaratif yang menjadi ciri utama teks berita, penggunaan kalimat pasif dan aktif juga membawa akibat yang berbeda.

4.1.2.1 Kalimat Pasif

Dalam kalimat pasif, hal yang ditonjolkan bukanlah subjek pelaku melainkan sasaran dari suatu pelaku atau tindakan. Berbeda halnya dengan kalimat aktif, subjek pelaku menjadi hal yang ditonjolkan atau difokuskan. Berdasarkan analisis, ditemukan adanya dominasi penggunaan kalimat pasif oleh Kompas.com.

- (11) Korban **dipaksa** menyetubuhi kucing lalu **direkam** pakai ponsel dan videonya **disebarkan** di media social
- (12) F **dipaksa** untuk bersetubuh dengan kucing, sambil **direkam** menggunakan ponsel beberapa waktu lalu.

Penggunaan kalimat pasif pada contoh-contoh di atas menyebabkan kehadiran pelaku menjadi tidak penting bahkan ditiadakan. Dalam kedua contoh di atas pelaku tidak hadir di dalam kalimat sehingga yang menjadi fokus utama disini adalah sasaran.

- (13) Seorang bocah SD berumur 11 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, **dipaksa** teman-temannya menyetubuhi kucing sembari **direkam** pakai ponsel.
- (14) Korban disebut **ditarget** menjadi tempat perundungan oleh empat orang terduga pelaku
- (15) Puncak perundungan, korban **dipaksa** bersetubuh dengan kucing dan **direkam** oleh salah satu terduga pelaku sambil melontarkan cemoohan.

Adapun pada contoh-contoh di atas, pelaku masih dihadirkan namun bukan sebagai subjek melainkan keterangan. Namun efek yang dihasilkan masih sama yakni media ingin memfokuskan peristiwa ini pada efek sasaran atau kronologi yang dialami oleh pihak korban. Penekanan melalui kronologi kejadian sekilas terlihat sebagai bentuk penekanan pada penderitaan korban, namun jika dilihat dari jenis berita yakni berita kejadian maka menjadi hal yang wajar untuk menjelaskan kronologi kejadian untuk memberikan informasi kepada pembaca. Di sisi lain, penekanan melalui kronologi kejadian juga memberikan keuntungan pada pihak media karena pilihan tekstual yang digunakan bernada emosional (**dipaksa**, **ditarget**, **direkam**) yang dapat mengundang atensi publik untuk membaca berita tersebut.

4.1.2.2 Kalimat Aktif

Bentuk kalimat yang digunakan media dalam mengkonstruksi teks berita tidak hanya sebatas persoalan tata bahasa. Lebih jauh, bentuk kalimat juga menentukan makna yang terbentuk, dan bahkan menunjukkan pemihakan daripada media itu sendiri. Seperti dalam kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, berbeda halnya dalam kalimat pasif, yang menjadikan seseorang objek dari pernyataannya. Berikut adalah beberapa contoh kalimat aktif yang digunakan Kompas.com;

- (16) Jokowi **mengaku** prihatin dan **menyampaikan** belasungkawa atas meninggalnya seorang anak di Tasikmalaya
- (17) Ketua Praksi Partai Nasdem DPR Roberth Rouw **mendesak** pihak kepolisian segera **menuntaskan** perkara perundungan anak di Tasikmalaya, Jawa Barat.
- (18) Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily **meminta** Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jawa Barat **memeriksa** lingkungan sosial tempat peristiwa perundungan anak di Tasikmalaya.

- (19) Ketiga pelaku **mengaku** tidak berniat merundung korban. Mereka pun **menyesali** perbuatannya kepada korban.

Contoh di atas digunakan Kompas.com dalam menggambarkan aktor sosial “pihak yang berwenang”. Hal ini menandakan bahwa hal yang ingin difokuskan media adalah subjek (pihak yang berwenang). Adapun kalimat-kalimat pada contoh di atas merujuk pada penjelasan sikap dan tanggapan atau respon pihak yang berwenang atas kasus perundungan yang terjadi. Dalam hal ini, pihak yang berwenang digambarkan sebagai pihak yang tegas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus tersebut. Selain pihak yang berwenang, contoh di atas (19) juga menunjukkan bagaimana pelaku digambarkan sebagai pihak yang baik karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

4.2 Representasi Peristiwa Kejadian

Representasi pada penjelasan sebelumnya dikatakan tidak hanya berbicara mengenai penggambaran aktor sosial yang terlibat dalam pemberitaan, melainkan juga tentang bagaimana peristiwa sosial (*social events*) khususnya dalam hal ini mengenai peristiwa perundungan digambarkan. Berdasarkan analisis, ditemukan sejumlah penekanan sebagai cara Kompas.com menggambarkan peristiwa perundungan. Bentuk-bentuk representasi tersebut masing-masing akan dijelaskan di bawah ini

4.2.1 Perundungan Sebagai Akibat Rendahnya Literasi Digital

- (22) Diakui atau tidak, kasus tersebut menjadi **bukti masih lemahnya literasi digital** di Indonesia. Upaya melindungi anak-anak dari kekerasan siber di tengah era digital harus segera ditingkatkan.

Data (20) di atas menggambarkan bagaimana perundungan direpresentasikan sebagai akibat dari rendahnya literasi digital. Penggunaan kata “bukti” yang merujuk pada lemahnya literasi digital pada data di atas menjadi sebuah penekanan bahwa perundungan di Indonesia salah satunya adalah karena rendahnya literasi digital masyarakat. Berkaca pada fakta yang ada, literasi digital selama ini hanya sebagai sekumpulan kompetensi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh penduduk berusia muda. Ketidapahaman tersebut menyebabkan efek negatif, salah satunya perilaku perundungan seperti dalam penelitian ini sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana menggunakan sosial

media dengan bijak. (Wijayanto, X. A., Fitriyani, L. R., & Nurhajati, L., 2019). Di akhir pernyataan, Kompas sudah memberikan rekomendasi bagaimana literasi digital seharusnya bisa segera ditingkatkan agar anak-anak terhindar dari kekerasan siber. Pernyataan seperti ini menjadi intervensi awal Kompas.com terkait bagaimana literasi digital menjadi kompetensi yang perlu dan harus ditingkatkan guna mencegah tingginya angka perundungan.

4.2.2 Perundungan Sebagai Akibat Dari Lemahnya Perhatian Guru dan Orangtua

- (21) Ade mengungkapkan, elemen yang paling sangat berpengaruh yaitu **keberadaan dan kepekaan orang tua** [...] Tugas guru, lanjutnya, harus **mampu mengarahkan anak yang kerap melakukan hal-hal negatif**, salah satunya perundungan [...] Sementara bagi orangtua, jangan sampai memiliki sifat acuh terkait informasi yang disampaikan sang anak.

Bentuk penggambaran Kompas.com selanjutnya terkait peristiwa perundungan adalah masih lemahnya peran guru dan orang tua dalam menyikapi kasus-kasus serupa. Dalam hal ini, Kompas.com melalui wawancaranya dengan Ketua KPAID menyimpulkan bahwa guru dan orangtua memiliki peran sentral dalam memutus rantai perundungan khususnya di sekolah. Karena bagaimanapun lingkungan sekolah menjadi tempat yang kerap kurang aman bagi korban. Selain itu, orangtua juga memiliki peran untuk acuh pada hal-hal yang disampaikan anak. Kedua hal ini tentu menjadi poin penting terkait bagaimana kasus perundungan di Indonesia bisa membaik kedepannya. Namun hal yang luput dari pemberitaan (*excluded*) adalah bagaimana anak-anak korban perundungan selama ini masih takut berbicara pada guru maupun orang tua karena belum terciptanya ruang aman bagi para korban untuk mengungkapkan perundungan yang dialami. Di sisi lain, Kompas.com juga tidak mempertanyakan bagaimana ketersediaan layanan lembaga-lembaga yang berwenang seperti misalnya KPAI terkait pengaduan korban perundungan. Selain itu, keamanan korban dalam melaporkan perundungan yang dialami juga perlu dipertanyakan, mengingat selama ini korban perundungan menjadi pihak yang menderita dan seringkali takut dalam menyuarkan apa yang dialami, salah satunya karena korban seringkali tidak dipercaya, karena tidak memiliki *power* lebih layaknya pelaku.

4.2.3 Perundungan Sebagai Sebuah Pelanggaran

- (22) Tiga tersangka kasus perundungan bocah SD di Tasikmalaya hingga membuat korban meninggal sudah ditentukan. Mereka dikembalikan ke orangtuanya masing-masing. Ketiga anak tersebut diketahui **melanggar** ketentuan Pasal 80 Juncto Pasal 76 C UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.

Pada contoh ini Kompas.com mengkonstruksi aktor pelaku sebagai orang yang melanggar UU. Kompas tidak mencoba merepresentasikan pelaku sebagai pihak yang keji atau tidak manusiawi karena menyebabkan korbannya meninggal dunia. Terlebih, Kompas juga tidak menjelaskan secara rinci isi dari UU yang dilanggar atau bahkan sanksi yang akan di dapat. Penggambaran hanya sebatas pada bagaimana pelaku telah melanggar ketentuan pasal dalam UU.

4.2.4 Perundungan Sebagai Fenomena Gunung Es

- (23) Aan mengatakan, tak menutup kemungkinan kasus bullying anak bisa saja bertambah karena dinilai sebagai **fenomena gunung es** atau kemungkinan masih bisa terjadi. Sehingga, peran orangtua serta orang dewasa di lingkungan sekitar sudah seharusnya mencontohkan sikap anti bully atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan sebutan “popoyok”, terutama terhadap anak.

Kompas.com dalam hal ini mencoba menggambarkan perundungan di Indonesia sebagai sebuah fenomena gunung es. Artinya, terdapat banyak kasus atau peristiwa serupa yang sampai saat ini mungkin belum diketahui atau dilaporkan. Kasus-kasus yang terjadi hanyalah Sebagian kecil dari banyaknya kasus perundungan yang belum terungkap. Pernyataan ini tentunya bisa menjadi acuan utama bahwa korban belum sepenuhnya berada dalam ruang aman untuk melaporkan apa yang dialami, hal tersebut dikarenakan minimnya bukti yang dimiliki korban sehingga akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Terlebih jika pengakuan korban tidak benar-benar dapat dibuktikan, pelaku seringkali melaporkan balik korban dengan dalih pencemaran nama baik. Fakta ini menjadi salah satu hal lumrah yang terjadi hari-hari ini sehingga korban semakin takut untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Penggunaan istilah “fenomena gunung es” menjadi hal yang baik untuk kembali mengingatkan publik khususnya pihak-pihak yang berwenang bahwa kasus perundungan bukanlah kasus sepele yang hanya terjadi dalam jumlah kecil. Namun kembali, Kompas.com masih belum berani mengintervensi pihak-pihak yang berwenang terkait layanan bagi korban untuk melaporkan perundungan yang dialaminya.

4.2.5 Perundungan Sebagai Akibat Dari Minimnya Sosialisasi

- (24) Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung, Ade Irfan Al-Anshori angkat bicara soal kasus perundungan terhadap bocah SD di Kota Tasikmalaya hingga menyebabkan korban meninggal [...] pihaknya mengaku, KPAD Kabupaten Bandung telah melakukan survei lapangan terkait sosialisasi sekolah baik tentang Permendikbud, Perpres, atau aturan sekolah yang menyangkut tentang perundungan. Namun kata dia, hasil dari pengecekan tersebut menunjukkan masih sangat **minim** dilakukan oleh pihak sekolah atau instansi terkait.

Representasi selanjutnya adalah bagaimana Kompas.com melihat perundungan sebagai akibat kurangnya sosialisasi terhadap aturan-aturan tentang perundungan seperti misalnya yang tertera pada Permendikbud, Perpres, maupun aturan sekolah. Dalam hal ini, penggambaran perundungan justru menjadi semakin luas dan jauh dari bahasan utama mengenai kasus perundungan yang terjadi, terlebih kepada perilaku pelaku.

4.2.6 Perundungan sebagai pergaulan keseharian (hal lumrah)

- (25) Rikha menambahkan, bullying atau dipoyokan bergeser kebiasaannya menjadi bahan **keseharian pergaulan** masyarakat terutama anak dengan anak, dewasa dengan anak, dan malah banyak dicontohkan di konten viral media sosial. Bahkan, budaya *bully* atau dipoyokan tersebut sengaja dibuat video dan disebar di media sosial supaya viral dan mendapatkan uang atau dikomersialisasikan.

Dalam penggambaran lainnya, perundungan juga dilihat sebagai kejadian yang lumrah dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Hal ini dikarenakan perundungan sering dijadikan konten di media sosial dan bahkan digunakan untuk mendapatkan keuntungan (uang). Penggambaran ini juga memiliki hubungan langsung dengan fakta rendahnya literasi digital, sehingga para pengguna media sosial masih belum bijak dalam menggunakan media sosial yang ada.

4.2.7 Perundungan sebagai Akibat dari Tingginya Penggunaan Media Sosial

- (26) **Intensitas penggunaan media sosial**, juga dinilai **berpengaruh signifikan** terhadap perilaku tersebut, di mana semakin tinggi intensitas penggunaan sosial media maka semakin tinggi terjadinya perilaku *bullying*.

Terakhir, Kompas.com juga melihat tingginya kasus-kasus perundungan di Indonesia sebagai akibat dari penggunaan media sosial yang tinggi pula. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan *We Are Social* menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari total populasi di dalam negeri. Di satu sisi, tingginya penggunaan sosial media menunjukkan angka melek digital masyarakat Indonesia tinggi. Namun hal ini tentu tidak

menjadi sebuah hal positif jika tidak dibarengi dengan sikap bijak dalam bermedia sosial atau pemahaman literasi digital yang baik. Karena seperti penggambaran sebelumnya, bahwa rendahnya literasi digital di tengah tingginya penggunaan media sosial salah satunya akan berdampak pada hal negatif yakni perundungan di dunia maya (*cyber bullying*).

Berdasarkan beberapa penggambaran di atas terkait peristiwa perundungan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompas.com melihat kasus perundungan yang terjadi sebagai sebuah peristiwa yang kompleks karena memiliki hubungan langsung dengan banyak hal, mulai dari lingkungan dan pola asuh yang tidak sehat hingga fakta rendahnya literasi digital di Indonesia membuat kasus-kasus perundungan di Indonesia semakin sulit diberantas. Dalam artian lain, Kompas.com melihat peristiwa perundungan tersebut melalui sudut pandang yang luas. Selain itu, Kompas.com dalam hal ini menitikberatkan tanggung jawab pada tingkat sosial, hal ini terlihat dari penekanan pada faktor-faktor sosial sebagai penyebab dari terjadinya perundungan.

Penekanan tanggung jawab secara sosial menjadikan Kompas.com belum menitikberatkan pelaku sebagai pihak yang juga bersalah dalam peristiwa tersebut. Kompas.com cenderung menggambarkan peristiwa perundungan melalui kaca mata umum. Dengan artian, Kompas.com tidak berusaha menjabarkan peristiwa perundungan yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pelaku secara individu. Kompas.com dalam hal ini melihat kesalahan yang dibuat pelaku sebagai sesuatu yang bukan murni karena kesalahannya melainkan karena serangkaian pengaruh lain yakni kurangnya perhatian orang-orang terdekat seperti misalnya orang tua maupun guru. Sehingga pembahasan Kompas.com menjadi sangat luas dan bahkan tidak secara khusus menyinggung perlakuan pelaku sebagai sesuatu yang keji.

5. Penutup

Dalam kaitannya dengan representasi aktor sosial, Kompas.com menggunakan pilihan-pilihan tekstual dengan nuansa yang berbeda. Terkait korban, Kompas.com secara dominan menjelaskan melalui kronologi kejadian dengan leksikon bernada emosional. Dengan strategi seperti ini, salah satu keuntungan yang didapat Kompas.com adalah kecenderungan pembaca untuk mengklik berita yang ditulis karena mengundang emosi pembaca. Pelaku, disisi lain, digambarkan melalui penggambarannya sebagai pihak yang

tidak berniat merundung korban dan pihak yang membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwenang. Adapun pihak yang berwenang, penggambarannya didominasi oleh leksikon-leksikon deskriptif karena berfokus pada penjelasan mengenai tugas pokok hingga tanggapan yang diberikan.

Di sisi lain, peristiwa perundungan (*social events*) digambarkan Kompas.com sebagai peristiwa yang kompleks. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kasus perundungan digambarkan melalui serangkaian sudut pandang, beberapa diantaranya berdasarkan hubungan sebab-akibat yakni melihat peristiwa perundungan sebagai akibat rendahnya literasi digital di Indonesia, perundungan sebagai akibat lemahnya perhatian guru dan orang tua, perundungan sebagai akibat tingginya penggunaan sosial media, hingga minimnya sosialisasi terkait aturan-aturan perundungan oleh pihak sekolah dan instansi terkait. Dalam konteks lainnya, peristiwa perundungan juga digambarkan sebagai sebuah fenomena gunung es hingga perundungan yang dilihat (hanya) sebatas pelanggaran terhadap UU yang berlaku. Penekanan pada faktor-faktor sosial sebagai penyebab terjadinya perundungan secara tidak langsung menjauhkan pelaku dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang juga bersalah dalam peristiwa yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Afzaal, M., Hu, K., Ilyas Chishti, M., & Khan, Z. (2019). Examining Pakistani News Media Discourses about China–Pakistan Economic Corridor: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis. *Cogent Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1683940>
- Amalia, T. V., Anshori, D. S., & Nurhadi, J. (2021). Teknik Penggambaran Aktor Terkait Perundungan Pasangan Gay Thailand di Koran Digital Indonesia. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 14(2), 133. <https://doi.org/10.30651/st.v14i2.8237>
- Caldas-Coulthard, C. R. (2003). Cross-Cultural Representation of ‘Otherness’ in Media Discourse. In *Critical Discourse Analysis* (pp. 272–296). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230514560_13
- Dijk, T. A. van. (1988). *News as Discourse*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Erdatimulia, N., Lestari, R. S., & Fajarwati, N. K. (2022). Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 291–302. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.120>
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse* (Vol. 6). Arnold.
- Fairclough, N. (2004). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*.
- Fairclough, N. (2006). *Discourse and Social Change*. Polity Press.
- Fowler, R. (1991). *Language in The News: Discourse and Ideology in The Press*. Routledge.
- Garnefski, N., & Kraaij, V. (2014). Bully Victimization and Emotional Problems in Adolescents: Moderation by Specific Cognitive Coping Strategies? *Journal of Adolescence*, 37(7), 1153–1160. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.07.005>
- He, X., & Zhou, X. (2015). Contrastive Analysis of Lexical Choice and Ideologies in News Reporting The Same Accidents Between Chinese and American Newspapers. *Theory and Practice in Language Studies*, 5(11), 2356. <https://doi.org/10.17507/tpls.0511.21>
- Huckin, T., Andrus, J., & Clary-Lemon, J. (2012). *Critical Discourse Analysis and Rhetoric and Composition* (Vol. 64, Issue 1).
- Mahsun. (n.d.). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. In 2017. Raja Grafindo Persada.

- Nartey, M., & Ladegaard, H. J. (2021). *Constructing Undesirables: A Critical Discourse Analysis of Othering of Fulani Nomads in The Ghanaian News Media*. *Discourse & Communication*, 15(2), 184–199. <https://doi.org/10.1177/1750481320982095>
- Noor, N., & Abdul Hamid, B. (2021). *Cyberbullying in The Name of God: Critical Discourse Analysis of Online Responses to the Act of De-hijabbing in Malaysia*. *3L The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 27(4), 219–233. <https://doi.org/10.17576/3L-2021-2704-15>
- Onay-Coker, D. (2019). *The Representation of Syrian Refugees in Turkey: a Critical Discourse Analysis of Three Newspapers*. *Continuum*, 33(3), 369–385. <https://doi.org/10.1080/10304312.2019.1587740>
- Osisanwo, A., & Iyoha, O. (2020). 'We are not Terrorist, We are Freedom Fighters': *Discourse Representation of The Pro-Biafra Protest in Selected Nigerian Newspapers*. *Discourse and Society*, 31(6), 631–647. <https://doi.org/10.1177/0957926520939687>
- Peng, A. Y., & Talmacs, N. (2022). *Jacinda Ardern and The Limits of Gender on The Chinese-Language Internet: A Critical Discourse Analysis*. *Feminist Media Studies*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2090408>
- Peng, A. Y., Wu, C., & Chen, M. (2022). *Sportswomen Under The Chinese Male Gaze: A feminist Critical Discourse Analysis*. *Critical Discourse Studies*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/17405904.2022.2098150>
- Samaie, M., & Malmir, B. (2017). *US News Media Portrayal of Islam and Muslims: A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis*. *Educational Philosophy and Theory*, 49(14), 1351–1366. <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1281789>
- Sengul, K. (2022). 'It's OK to be White': *The Discursive Construction of Victimhood, 'Anti-White Racism' and Calculated Ambivalence in Australia*. *Critical Discourse Studies*, 19(6), 593–609. <https://doi.org/10.1080/17405904.2021.1921818>
- UNICEF Indonesia. (2020). *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*.
- van Leeuwen, T. (2018). *Moral Evaluation in Critical Discourse Analysis*. *Critical Discourse Studies*, 15(2), 140–153. <https://doi.org/10.1080/17405904.2018.1427120>
- Wang, G., & Ma, X. (2021). *Representations of LGBTQ+ Issues in China in its Official English-Language Media: A Corpus-Assisted Critical Discourse Study*. *Critical Discourse Studies*, 18(2), 188–206. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1738251>
- Wijayanto, X. A., Fitriyani, L. R., & Nurhajati, L. (2019). *Seri Literasi Digital Japelidi Xenia Angelica Wijayanto Lamria Raya Fitriyani Lestari Nurhajati*.

Wiredu, J. F. (2012). *A Grammar of Newspaper Editorial Language: The Complex Sentence*. <https://doi.org/10.4314/LJH.V23I0>

Wyszomierski, L. E. (2015). *Boko Haram and The Discourse of Mimicry: A Critical Discourse Analysis of Media Explanations for Boko Haram's Improved Video Propaganda Quality*. *Critical Studies on Terrorism*, 8(3), 503–515. <https://doi.org/10.1080/17539153.2015.1091657>

Yanti, F. D., Fata, A. K., & Anwari, A. (2021). Berita Bullying di Media Online (Analisis Wacana terhadap Kompas.com dan Republika Online). *Jurnal Jurnalisa*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v7i1.20718>

Żuk, P., & Żuk, P. (2020). 'Murderers of The Unborn' and 'Sexual Degenerates': Analysis of The 'Anti-Gender' Discourse of the Catholic Church and The Nationalist Right in Poland. *Critical Discourse Studies*, 17(5), 566–588. <https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1676808>